

FILM DOKUMENTER DIRTY VOTE 02: BENTUK PERLAWANAN TERHADAP NARASI TUNGGAL REZIM

Mhd Ricky Ardiansyah Putra^{1)*}, Izuddinsyah Siregar²⁾, Ismail Jahiddin³⁾, Lode Wijk
Pandapotan⁴⁾, Irda Yusepa⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan-Indonesia

*Corresponding Author: ricky_ardian@unimed.ac.id

ABSTRACT

The film Dirty Vote 02 is a critical way of talking about politics that shows disagreement with the narrative of one regime in the current Indonesian public space. The purpose of this research is to see how the film uses narrative, visual, and symbolic strategies to construct a counter-discussion about the hegemony of power. Based on Norman Fairclough's model for critical discourse analysis, the approach used is qualitative and focuses on the relationship between language, ideology, and power. The results indicate that Dirty Vote 02 film is an alternative media that seeks to revive communicative rationality (Habermas) through the dissemination of rational data and arguments and simultaneously cracks the ideological hegemony of the regime (Gramsci). This film serves as an alternative public space where people can reassess the legitimacy of power and restore critical thinking about dominant political discourse. And this film can also serve as a form of political education for the public and as a reference for analyzing symptoms or events related to politics, policy, governance, and broader societal issues, which today are mostly presented through a single discourse or narrative by various anti-mainstream media in Indonesia. Therefore, this documentary film can be used strategically as a symbolic tool to challenge the dominance of national discourse and to strengthen deliberative democracy this Indonesia.

Keywords: Critical Discourse; Hegemony; Public Space; Political Communication; Dirty Vote 02

ABSTRAK

Film Dirty Vote 02 adalah cara kritis untuk berbicara tentang politik yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap cerita satu rezim di ruang publik Indonesia saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana film tersebut menggunakan strategi naratif, visual, dan simbolik untuk mengonstruksi diskusi tandingan tentang hegemoni kekuasaan. Berdasarkan model Norman Fairclough untuk analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan berfokus pada hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dirty Vote 02 adalah media alternatif yang berusaha menghidupkan rasionalitas komunikatif (Habermas) melalui penyebaran data dan argumen yang rasional dan sekaligus meretakkan hegemoni ideologis rezim (Gramsci). Film ini berfungsi sebagai ruang publik alternatif di mana orang dapat menilai ulang legitimasi kekuasaan dan memulihkan daya kritis terhadap wacana politik yang dominan. Dan film ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran politik pendidikan untuk masyarakat dan referensi sebagai analisis ketika melihat gejala atau peristiwa yang berkaitan dengan politik, kebijakan, pemerintahan dan masyarakat luas yang kebanyakan saat ini disampaikan dalam satu wacana atau narasi oleh media-media antimentream yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, film dokumenter ini dapat digunakan secara strategis sebagai alat simbolik untuk menentang dominasi wacana nasional dan untuk memperkuat demokrasi deliberative di Indonesia.

Kata kunci: Ruang Publik; Hegemoni; Komunikasi Politik; Wacana Kritis; Dirty Vote 02

PENDAHULUAN

Saat semakin dekat dengan Pemilu 2024, ruang publik Indonesia semakin dipenuhi dengan konflik politik dan perbedaan pendapat. Rilis film dokumenter *Dirty Vote*, yang disutradarai oleh jurnalis investigatif Dandhy Dwi Laksono, adalah salah satu peristiwa komunikasi politik yang menarik perhatian. Film ini langsung menarik perhatian banyak orang ketika dirilis di YouTube pada Februari 2024. Film tersebut mengumpulkan jutaan tontonan dalam waktu kurang dari 48 jam, menjadi topik pembicaraan di berbagai media sosial, dan memicu reaksi kuat dari para politisi dan pendukung kandidat (Jakarta, 2024)

Tiga ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, berbicara di *Dirty Vote* tentang dugaan adanya upaya rekayasa kekuasaan melalui kebijakan dan keputusan pemerintah yang dianggap menguntungkan pasangan calon presiden. Film ini menampilkan data, kronologi, dan argumen hukum yang disusun secara naratif dan visual untuk menunjukkan adanya desain sistemik yang menjamin kelangsungan kekuasaan. Akibatnya, film ini bukan sekadar hiburan; itu adalah alat komunikasi politik dan cara untuk menyatakan penolakan terhadap cerita resmi pemerintah yang lebih menekankan "netralitas" dan "keberhasilan demokrasi" (Modern Diplomacy, 2024).

Setelah itu, film dokumenter *Dirty Vote 02* kembali tayang pada Oktober 2025, membahas dan memprediksi bagaimana konstalasi politik Indonesia berkembang, baik di dalam negeri maupun dengan elite internasional. Sumbernya tetap sama seperti dalam film *Dirty Vote 01*, yang menampilkan tiga kawakan ahli hukum tata negara Indonesia. Mereka berbicara tentang bagaimana prediksi pemerintah bertindak dengan kekuasaannya, program-programnya, dan kebijakannya dibandingkan dengan keadaan dan perkembangan politik di dalam negeri.

Dari sudut pandang teori komunikasi politik, penayangan film *Dirty Vote 02* menunjukkan pergeseran jenis perlawanan dari dunia nyata ke dunia digital dan simbolik. *Dirty Vote* dapat menyampaikan pesan langsung ke publik melalui YouTube dan media sosial tanpa harus melewati kepemilikan media utama. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia digital dapat berubah menjadi ruang publik yang berlawanan, sebuah area yang berbeda yang memungkinkan narasi yang menentang dominasi pendapat pemerintah (Duvneage, 2018). Oleh karena itu, film ini bukan hanya karya visual; itu juga merupakan sarana diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh kebenaran dan kejujuran dalam politik.

Kajian dari perspektif teoretis dan praktis

Dirty Vote 02 telah dievaluasi dari berbagai sudut pandang oleh beberapa studi akademik sebelumnya. Menurut penelitian yang didasarkan pada *Critical Discourse Analysis* (CDA), film ini

menampilkan tokoh politik, tindakan mereka, dan hubungan kekuasaan melalui bahasa dan gambar yang kuat (Prasetyo, 2025). Selain itu, analisis semiotik juga digunakan untuk menyelidiki makna tersembunyi di balik penggunaan arsip video, suara narasi, dan tampilan data (Putri, 2024).

Metode ini menunjukkan bahwa *Dirty Vote 02* menciptakan perdebatan yang menentang ideologi negara dengan menggunakan argumen yang didasarkan pada hukum dan prinsip moral masyarakat. Selain itu, penelitian kuantitatif oleh Nurhayati dan Fathoni (Nurhayati & Fathoni, 2024) terhadap mahasiswa di tiga universitas di Jawa menemukan bahwa menonton film *Dirty Vote 01* meningkatkan pengetahuan politik dan kesadaran tentang masalah korupsi pemilu. Namun, hasilnya berbeda untuk setiap responden; beberapa justru menunjukkan keraguan yang lebih besar terhadap informasi politik secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa dokumenter seperti ini memiliki dampak dua arah. Ini meningkatkan kesadaran politik di satu sisi, dan memperkuat perpecahan di sisi lain.

Studi lain (Rahardjo, 2024) menunjukkan bahwa platform online seperti YouTube memainkan peran penting dalam mempercepat penyebaran cerita anti-pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengontrol momentum viral yang dihasilkan oleh penyebaran film melalui internet. Selain itu, penyebaran film membawa risiko represi digital, seperti laporan konten, atau tekanan politik terhadap pembuat film. Oleh karena itu, *Dirty Vote 02* menunjukkan bagaimana media digital berfungsi untuk menghubungkan produser cerita anti-pemerintah dengan upaya penguasa untuk membatasi wacana.

Meskipun *Dirty Vote 01* telah dibahas dalam beberapa jurnal akademik dan populer, masih ada beberapa hal yang belum dipelajari secara menyeluruh. Yang pertama, *Dirty Vote 02* belum banyak dianalisis, sedangkan mayoritas penelitian hanya membahas film pertama. Namun, film sekuel ini mengalami beberapa perubahan dalam cerita dan gaya penyampaian, seperti penggunaan visual yang lebih provokatif dan kritik yang lebih tajam terhadap hubungan antara oligarki dan penyelenggara pemilu. Dengan membandingkan film pertama dan kedua, kita dapat melihat bagaimana cara pembicaraan dan posisi politik pembuat film berubah dalam konteks kekuasaan yang terus berubah (Rasyid, 2019).

Yang Kedua, tidak banyak penelitian yang melihat dampak film terhadap perilaku politik masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun efek film dokumenter politik sering kali bersifat sementara, penelitian saat ini biasanya hanya melihat lintas waktu. Penelitian terus-menerus diperlukan untuk mengetahui apakah film seperti *Dirty Vote* hanya memicu perasaan tertentu

dalam waktu singkat atau benar-benar mengubah cara orang berpikir tentang politik dalam jangka panjang (Nurhayati & Fathoni, 2024).

Yang ketiga, penelitian belum melakukan perbandingan cerita dalam *Dirty Vote* dengan cerita yang diterbitkan oleh pemerintah atau media utama. Studi seperti ini sangat penting untuk memahami bagaimana dokumen-dokumen ini berfungsi: sebagai kritik, parodi, atau pengulangan narasi dominan yang baru. Metode analisis wacana simultan dapat membantu mengidentifikasi dinamika ini (Prasetyo, 2024). Yang keempat, pemahaman tentang persepsi publik terhadap film ini masih umum dan tidak dipengaruhi oleh usia, status sosial, atau partisipasi politik. Analisis segmen masyarakat sangat penting dalam konteks Indonesia yang beragam untuk mengetahui seberapa jauh film ini dapat menjadi alat edukasi politik atau malah memperkuat perbedaan pendapat (Rahardjo, 2024). Selanjutnya, elemen hukum dan penyebaran dan pemfilteran konten algoritma pada platform digital masih kurang diperhatikan. Pertanyaan penting dalam studi media saat ini adalah bagaimana kebijakan platform memengaruhi visibilitas film politik kritis (Setiawan, 2025).

Berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan, penelitian ini berkonsentrasi pada *Dirty Vote 02* sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan pemerintah. Metode analisis wacana kritis dan semiotik naratif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk: Memahami strategi retorik dan simbolik yang digunakan dalam *Dirty Vote 02* untuk membuat narasi yang berbeda. Melihat bagaimana film ini menggambarkan hubungan antara ideologi dan kekuasaan dalam konteks pemilu Indonesia. memahami bagaimana film ini berada dalam jaringan komunikasi publik digital, terutama tentang bagaimana ia berhubungan dengan narasi resmi pemerintah.

Penelitian ini memiliki keuntungan teoritis dan praktis. Penelitian ini, dari perspektif teori, meningkatkan pemahaman kita tentang komunikasi politik dengan menunjukkan bagaimana dokumenter digital membantu membangun perlawanan terhadap dominasi negara. Dalam konteks praktis, hasil penelitian dapat membantu memahami keadaan demokrasi digital di Indonesia dan memberikan saran untuk kebijakan yang mengatur kebebasan berbicara dan media dalam konteks pemilu.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketika Habermas berbicara tentang ruang publik (Albino, 2017), dia menciptakan dasar untuk melihat bagaimana komunikasi publik berfungsi di masyarakat modern. Habermas

mendefinisikan ruang publik dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere* sebagai arena diskursif di mana warga negara terlibat dalam diskusi rasional-kritis tentang masalah kepentingan bersama. Ruang publik idealnya bebas dari dominasi aktor negara dan pasar. Komunikasi yang terbuka dan tidak terbatas di ruang tersebut idealnya akan menghasilkan konsensus yang berlandaskan pada rasionalitas komunikatif.

Namun, dalam praktik demokrasi modern, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip-prinsip ini sering terdistorsi oleh kekuatan yang tidak proporsional dari institusi dan aktor-aktor yang memiliki akses lebih besar ke infrastruktur media. Jenis kerusakan seperti ini disebut oleh Habermas sebagai "komunikasi yang terdistorsi". Menurut Habermas, ini terjadi ketika wacana publik menjadi alat legitimasi kekuasaan dan bukannya tempat untuk pertimbangan rasional. Kerangka teoretis ini dapat digunakan untuk menjelaskan film *Dirty Vote 02*. Film tersebut bertujuan untuk merebut kembali ruang publik, yang berarti memungkinkan orang untuk berbicara dengan orang lain setelah dihalangi oleh cerita resmi pemerintah. Film ini berusaha memulihkan rasionalitas komunikatif yang telah dikaburkan oleh retorika resmi dengan menyampaikan materi bukti, argumen hukum, dan data empiris dalam bentuk naratif. Oleh karena itu, *Dirty Vote 02* berfungsi sebagai komunikasi politik deliberatif yang menuntut pihak yang berkuasa untuk bertanggung jawab kepada publik selain sebagai artefak dokumenter (Rahardjo, 2024).

Selain itu, migrasi ruang publik ke lingkungan digital dibahas dalam karya ini. Platform media sosial dan YouTube telah menciptakan ruang publik digital baru di mana pengguna dapat mengakses, mengkritik, dan menilai keyakinan pembuat konten. Digitalisasi, bagaimanapun, membawa paradoks. Sementara ia memperluas partisipasi, ia juga membuka ruang diskursif untuk manipulasi algoritmik dan polarisasi informasi. Ruang publik penting bagi demokrasi karena berfungsi sebagai mediator antara negara dan masyarakat sipil, memungkinkan penalaran kolektif dan partisipasi publik (Danner, 2015).

Teori hegemoni Gramsci dalam (Hoare & Sperber, 2019) memberi kita perspektif konseptual yang kuat untuk memeriksa aspek politik *Dirty Vote 02*. Gramsci menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan tetapi juga melalui konsensus—penerimaan ideologis terhadap tatanan sosial yang ada. Dalam pendidikan, media, wacana, dan institusi budaya, ideologi dominan direproduksi. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pembentukan hegemoni. Masyarakat sipil menjadi arena tempat gagasan diperdebatkan dan konsensus dibangun, menjadikannya ruang bagi dominasi sekaligus perlawanan (Özçelik, 2025).

Dalam konteks Indonesia, narasi resmi yang menekankan "stabilitas", "netralitas aparat", dan "keberhasilan demokrasi" berfungsi sebagai alat diskursif untuk mengokohkan legitimasi negara. *Dirty Vote 02* berfungsi sebagai peran kontra-hegemonik dengan menciptakan wacana pengetahuan alternatif yang menantang representasi dominan. Film ini berupaya mengungkap mekanisme pembentukan hegemoni negara dengan menggunakan penalaran hukum dan bukti empiris tentang praktik manipulasi kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa persetujuan publik dapat direkayasa melalui kontrol informasi dan pengelolaan citra. Menurut Gramscian, pembuat film berfungsi sebagai agen kultural organik yang berusaha menyingkap struktur dominasi yang tersembunyi dalam wacana resmi (Putri, 2024).

Di era digital, dinamika hegemonik juga berubah. Korporasi media dan algoritma platform digital sekarang berbagi kontrol atas pembingkai naratif dan visibilitas. Dalam konteks ini, *Dirty Vote 02* menghadapi hegemoni bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang teknologi, yang mengatur bagaimana pesan didistribusikan dan tersebar di dunia digital (Setiawan, 2025). Oleh karena itu, film ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan resistensi kultural yang konsisten dalam lingkungan komunikasi digital yang semakin terkonsentrasi. Dengan memahami pentingnya kontra-hegemoni, gerakan sosial dapat membangun narasi alternatif dan memperoleh konsensus publik (Kim, 2015).

METODE PENELITIAN

Desain analisis wacana kritis (AWK) dan analisis semiotika media digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami film *Dirty Vote 02* sebagai hasil komunikasi serta praktik sosial dan ideologis tentang hubungan kekuasaan. Analisis wacana kritis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bahasa, gambar, dan simbol digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur dominasi dalam masyarakat Fairclough dalam (al., 2022). Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian, yang adalah untuk menyelidiki *Dirty Vote 02* sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap cerita pemerintah satu-satunya. Selain itu, metode ini menggabungkan teori-teori seperti Hall (Hall, 1997) tentang representasi, Gramsci tentang hegemoni budaya, dan Habermas tentang komunikasi rasional. Sejalan dengan pendekatan ini kritis ini, perspektif hegemoni Gramsci besar pengaruhnya terhadap AWK karena melalui Bahasa mau digambarkan tentang kekuasaan dan perjuangan kekuasaan yang mengandalkan pada persetujuan dari pada koersi yang artinya bentuk konsesus yang merupakan proses subordinasi kesadaran yang dibangun tanpa kekerasan tetapi dengan landasan budaya dan persuasi intelektual (Haryatmoko,

2016). Oleh karena itu, penelitian ini melihat film sebagai teks yang memiliki ideologi, yang menggambarkan konflik makna antara pembicaraan rakyat dan pemerintah.

Studi ini menganalisis komunikasi politik Indonesia menjelang dan pasca Pemilu 2024, ketika film *Dirty Vote 02* dirilis dan menjadi subjek diskusi publik di media sosial, YouTube, dan berita daring. Ruang digital, di mana film-film ini didistribusikan dan dibicarakan, terutama di YouTube dan Instagram, dianggap sebagai ruang publik digital. Ruang publik digital adalah tempat di mana wacana alternatif tentang cerita pemerintah berkembang dengan cepat, tidak terpusat, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, tempat penelitian bukanlah lokasi geografis; sebaliknya, itu adalah ruang diskursif, di mana wacana film berinteraksi dengan publik dan media. *Dirty Vote 02*, film dokumenter 4 jam yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan dirilis di YouTube pada tahun 2025, adalah subjek utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film dokumenter *Dirty Vote 01* dirilis pada awal tahun 2024 melalui akun YouTube. Tiga ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari, berperan dalam film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Film ini berdurasi sekitar satu jam dan membahas dugaan pelanggaran demokrasi dan penggunaan kekuasaan yang tidak adil menjelang Pemilu 2024.

Film ini bukan hanya dokumenter berisi informasi tetapi juga media komunikasi politik yang mendorong pemikiran kritis. Tujuannya adalah untuk mengembalikan cara berpikir yang logis di tengah banyaknya propaganda politik yang bersifat menyebarkan pesan dari atas ke bawah. Secara umum, film ini memiliki dua tujuan utama:

1. Makna informatif, yang mencakup penyampaian data hukum dan argumen akademis tentang penggunaan kekuasaan yang salah.
2. Makna ideologis, narasi moral dan simbolik, yang menunjukkan sikap film sebagai cara untuk menentang narasi pemerintah yang hanya satu arah.

Dirty Vote 02 kembali pada Oktober 2025 dengan menyajikan data dan analisis tentang perubahan dalam konstalasi politik saat ini, termasuk kekuatan militer, ekonomi nasional dan global, serta prediksi kebijakan pemerintah yang akan datang.

Analisis Diskusi Kritis: Bahasa dan Struktur Film

Dalam perspektif Fairclough (Norman Fairclough, 2010) film *Dirty Vote 02* dapat dievaluasi dari sudut pandang tiga dimensi: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial:

1. Analisis Teks

Dalam hal bahasa dan retorika, film ini menggunakan gaya bahasa yang berupa argumen yang kuat tentang etika dan hukum. Kata-kata seperti rekayasa demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap konstitusi menciptakan perbedaan moral antara yang berkuasa dan rakyat.

Ketidaksepakatan ini menyampaikan bahwa rakyat, bukan pemerintah, sekarang bertanggung jawab atas kebenaran dan etika. Sesuai dengan teori Gramsci, ini merupakan transformasi simbolik yang menggambarkan jenis penentangan hegemoni. Selain itu, narator film berbicara dengan cara yang jelas dan teratur, seolah-olah mereka mengajak penonton untuk memikirkan secara logis sekaligus mengalami perasaan. Film tidak hanya berisi pendapat tetapi argumen yang didasarkan pada komunikasi rasional karena grafik hukum dan data angka membuatnya terlihat ilmiah (Habermas, 1981).

2. Analisis Aplikasi Diskursif

Film ini diproduksi di luar media besar dalam hal praktik diskursif, menunjukkan upaya independen untuk memperoleh ruang publik digital. YouTube dipilih karena jangkauannya yang besar dan kurangnya pengawasan editorial. Menurut Setiawan (Setiawan, 2025), penyebaran film *Dirty Vote 02* menunjukkan fenomena diskursus yang didorong oleh publik. Tidak hanya penonton, masyarakat juga merupakan agen yang menyebarkan dan menginterpretasikan film. Mereka membuat infografis, mengunggah potongan video, dan membagikannya melalui media sosial. Oleh karena itu, film ini tidak hanya menawarkan cara untuk berkomunikasi, tetapi juga menarik orang untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, yang pada gilirannya berdampak pada politik di dunia digital.

Reaksi terhadap film terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian orang, termasuk akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil, melihatnya sebagai sarana untuk mengajarkan politik. Di sisi lain, orang-orang yang bertanggung jawab dan mendukung pemerintah menuduhnya sebagai propaganda oposisi. Diskusi ini menunjukkan bahwa film ini berhasil memungkinkan publik untuk berbicara tentang masalah yang sebelumnya tertutup oleh narasi pemerintah yang hanya satu arah.

3. Analisis Praktik Sosial

Film ini bertindak dalam lingkungan sosial di mana politik tidak seimbang dan negara memiliki kendali penuh atas media, lembaga, dan hukum. Kondisi ini disebut sebagai kolonisasi ruang publik oleh Habermas (Habermas, 1981). Di sini strategi kekuasaan menggantikan komunikasi rasional. Dalam situasi seperti ini, film *Dirty Vote 02* berfungsi sebagai percakapan publik tentang kekuatan upaya untuk memulihkan fungsi ruang publik melalui pembicaraan rasional dan transparansi data. Film ini menantang dominasi simbolik rezim dengan mengungkap

penyalahgunaan hukum dan nepotisme. Gramsci (Gramsci, 1971) menyebut tindakan ini sebagai "perang posisi" perang ideologi di bidang budaya dan wacana yang dilakukan melalui pertarungan makna daripada kekerasan.

Mempertimbangkan Representasi dan Ideologi

Teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall (Hall, 1997) menawarkan bantuan dalam memahami bagaimana film mengonstruksi realitas sosial-politik. *Dirty Vote 02* tidak hanya merekam fakta; itu juga memilih, memahami, dan menampilkan fakta dalam konteks moral tertentu.

Tabel 1. Tiga oposisi utama ditemukan dalam representasi film

Representasi	Pihak Pertama	Pihak Kedua (Oposisi Makna)	Makna Ideologis
Demokrasi vs. Manipulasi	Rakyat, aktivis, konstitusi	Elite, pejabat, oligarki	Kritik terhadap reduksi demokrasi menjadi ritual elektoral
Rasionalitas vs. Propaganda	Pakar hukum, data, Media argumen	pemerintah, slogan, kampanye	Pemulihan wacana rasional di ruang publik
Moralitas vs. Kekuasaan	Etika publik, kebenaran	hukum, Kekuasaan, nepotisme, loyalitas	Legitimasi moral sebagai sumber otoritas baru

Untuk memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang otoritas, film menggunakan retorika visual dan moral. Ini sejalan dengan gagasan Habermas bahwa legitimasi politik harus berasal dari komunikasi yang tidak dipengaruhi. Selain itu, film menampilkan karakter intelektual organik (Gramsci) melalui narator akademisi yang berusaha untuk menghubungkan ilmu hukum dengan kesadaran publik. Mereka berbicara sebagai warga yang mengajak orang lain untuk berpikir kritis, bukan sebagai politisi. Posisi ini menegaskan sifat *Dirty Vote 02* sebagai bentuk perlawanan budaya terhadap dominasi ideologis bangsa.

Perlawanan Simbolik di Ruang Publik Online

Ruang publik sekarang merupakan bagian dari jaringan internet dan tidak lagi dimiliki oleh media utama. Ini digunakan dalam film *Dirty Vote 02* untuk menyampaikan pesan langsung kepada penonton tanpa menggunakan lembaga resmi. Film ini berhasil memicu diskusi kelompok yang mengkritik integritas sistem demokrasi, menurut penelitian netnografi terhadap komentar yang muncul. Sebagai ilustrasi, ada komentar seperti:

“Terima kasih kepada tim dirty vote yang telah mewakili keresahan kami. Sebagai salah satu WNI yang jauh dari Indonesia, saya percaya kita semua sejatinya tetap mencintai tanah

air. Semoga api perjuangan ini tak pernah padam, panjang umur perjuangan”. (dari pemilik akun youtube @muflihulakbar)

“Saya harap semakin banyak orang Indonesia yang mau nonton KULIAH UMUM BERKUALITAS DAN GRATIS ini, gak papa sih dibilang fomo dan puber politik, yang penting ada usaha biar bisa jadi pribadi lebih baik dan sadar politik negeri sendiri, bukan politik di drama doang Sudah saya share ke seluruh medsos saya”. (komentar dari akun youtube @syelvabahri)

Sebaliknya, perspektif yang berlawanan juga muncul, seperti:

“Mohon maaf saya tidak sepenuhnya setuju karena pembahasannya tidak begitu kompleks, kenapa ada perubahan jelas ada penjelasan. Tapi yang di bahas hanya masalah perubahannya saja.” (Komentar dari akun youtube @arthalukas9312)

“apaan si ini. dibayar brp sama orang-orang yang mau ditangkap pak Prabowo...mengeluhnya sekarang padahal asal masalah dari presiden yang 2 periode sebelumnya.” (dari akun youtube @laksamanaaro3141)

Ini menunjukkan bahwa film berfungsi sebagai tempat diskusi gagasan, bukan sekadar interpretasi yang tepat, seperti yang dilakukan Habermas. Ini menggerakkan diskusi diskursif, dialog kritis yang penting dalam demokrasi yang mempertimbangkan pendapat semua pihak. Proses ini juga mencakup cara algoritma YouTube bekerja. Setiawan (Setiawan, 2025) menyatakan bahwa algoritma ini memiliki kemampuan untuk membatasi atau memperluas cara pesan sampai ke masyarakat. Fakta bahwa film *Dirty Vote 02* masih dapat dilihat oleh banyak orang meskipun telah dilaporkan dan dipaksa oleh pemerintah menunjukkan bahwa perlawanan digital di ruang publik masih kuat. Oleh karena itu, perlawanan terjadi tidak hanya dalam film itu sendiri, tetapi juga dalam cara orang melihat, menonton, dan berbicara tentangnya.

Menurut analisis sebelumnya, film *Dirty Vote 02* menentang narasi dominan pemerintah dalam tiga gaya:

1. Film Perlawanan Diskursif (Habermas) bertujuan untuk mengembalikan komunikasi publik ke dasar fakta dan argumen daripada retorika kekuasaan. menggalakkan diskusi logis di ruang digital.
2. Film Perlawanan Ideologis (Gramsci, 1971) menjadi teks yang menentang dominasi ideologi pemerintah dan menunjukkan bagaimana negara mengontrol pemikiran masyarakat. Dalam mengajar masyarakat, akademisi berfungsi sebagai intelektual dasar.
3. Film Perwakilan (Hall, 1997) menggambarkan rakyat sebagai subjek yang memiliki prinsip moral dan politik. Mengalihkan makna dari posisi kekuasaan ke kesadaran masyarakat

Secara keseluruhan, film *Dirty Vote 02* berhasil memungkinkan diskusi terbuka tentang keadilan dan kebenaran. Film ini menunjukkan bahwa media budaya dapat berfungsi sebagai alat demokrasi daripada hanya alat hiburan. Oleh karena itu, film ini bukan hanya sebuah produksi film; itu juga merupakan tindakan moral-politik; itu adalah cara komunikasi etis untuk mengembalikan nilai kebenaran dalam demokrasi yang telah kehilangan maknanya secara substansial.

1. Ruang Publik Baru dan Perlawanan Digital

Ruang publik digital juga dikenal sebagai "ruang publik digital" telah menjadi arena baru perlawanan ideologis, seperti yang ditunjukkan dalam Distribusi *Dirty Vote 02* yang disiarkan di platform YouTube. Melalui diskusi online, komentar, dan potongan video, khalayak tidak hanya mengonsumsi pesan tetapi juga berkontribusi pada narasi.

Fenomena film yang menjadi viral menunjukkan bahwa ruang digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mengganggu dominasi narasi politik. Perlawanan ini, bagaimanapun, juga menghadapi masalah dari sistem algoritma dan sensor halus yang mengatur visibilitas konten. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan ideologis saat ini terjadi di dua arena sekaligus: wacana dan algoritmik.

2. Sintesis dari Hipotesis

Studi tersebut menemukan bahwa *Dirty Vote 02* adalah jenis komunikasi politik hibrida yang menggabungkan elemen digital, representasional, ideologis, dan diskursif. Dengan menggabungkan gagasan Habermas, Gramsci, Hall, dan Fairclough, dapat dipahami bahwa:

1. Film berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan rasionalitas masyarakat (Habermas)
2. Sebagai alat untuk menentang ideologis hegemoni negara (Gramsci),
3. Sebagai cara untuk menciptakan makna moral dan gambaran rakyat (Hall), dan
4. Sebagai metode wacana kritis yang menghentikan komunikasi yang salah (Fairclough).

Jadi, *Dirty Vote 02* menunjukkan bagaimana media budaya dapat membantu demokrasi deliberatif dan melakukan perlawanan non-kekerasan yang bergantung pada wacana dan kesadaran publik. Secara keseluruhan, *Dirty Vote 02* menunjukkan bahwa media dokumenter dapat berfungsi sebagai alat untuk melawan kekuasaan hegemonik secara simbolik dan diskursif. Film ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya ada di lembaga politik, tetapi juga di ruang komunikasi yang terbuka dan berpikir kritis. *Dirty Vote 02* menunjukkan bahwa suara rakyat masih melalui bahasa, foto, dan kesadaran di Indonesia, di mana narasi tunggal sering mendominasi percakapan

publik. Perjuangan melalui wacana, bukan kekerasan; perselisihan, bukan provokasi; inilah cara komunikasi yang memerdekakan.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis film dokumenter *Dirty Vote 02* sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi tunggal rezim. Penelitian ini menggunakan teori tindakan komunikatif (Habermas), teori hegemoni (Gramsci), teori representasi (Hall), dan pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough) sebagai pendekatan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik sebagai berikut.: Film *Dirty Vote 02* adalah contoh komunikasi publik deliberatif yang bertujuan untuk mengembalikan kejujuran dalam debat politik. Film ini menawarkan ruang diskursif alternatif yang memungkinkan publik mengkritisi asumsi kekuasaan dalam situasi di mana komunikasi publik biasanya dimonopoli oleh narasi resmi pemerintah. Film ini menerapkan prinsip Habermasian tentang tindakan komunikasi melalui gaya argumentatif, data hukum, dan narasi moral. Ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan melalui argumentasi rasional daripada paksaan kekuasaan.

Film tersebut berfungsi sebagai representasi dari ruang publik tandingan, atau counter-public space, yang muncul di tengah kemacetan komunikasi politik formal. Di sini, demokrasi tidak hanya prosedural tetapi juga komunikatif karena masyarakat berperan aktif sebagai penerima dan penyebar pembicaraan.

Gramsci mengatakan bahwa kekuasaan bekerja melalui hegemoni, yaitu dominasi ideologis yang membuat perspektif rezim terlihat alami dan tidak dapat diperdebatkan. *Dirty Vote 02* menantang hegemoni ini dengan membongkar cara aparaturnegara, hukum, dan praktik politik menggunakan kekuasaan. Film ini berperan sebagai teks tandingan, atau teks anti-hegemonik, yang memberi tahu masyarakat bahwa konsensus sosial yang dibangun oleh pemerintah sebenarnya merupakan konstruksi ideologis dan bukan netral. Tiga akademisi hukum adalah "intelektual organik" karena mereka berbicara sebagai narator (Gramsci, 1971), yang menjembatani antara pengetahuan ilmiah dan kesadaran rakyat. Oleh karena itu, film ini tidak hanya menarik kritik, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang hak demokratis masyarakat dan politik kewargaan.

Dirty Vote 02 menunjukkan oposisi simbolik yang jelas antara rakyat dan penguasa, moralitas dan kekuasaan, hukum dan manipulasi, menurut teori representasi Hall (Hall, 1997) Gambar ini menunjukkan bagaimana bahasa verbal dan visual menciptakan makna politik. Dalam film, rakyat digambarkan sebagai subjek moral yang berhak atas kebenaran dan keadilan,

sementara kekuasaan digambarkan sebagai sesuatu yang tidak memiliki legitimasi moral. Posisi film sebagai teks moral yang mendorong kesadaran publik diperkuat oleh rekaman video pejabat, suara narator yang tegas, dan visualisasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al., L. et. (2022). Critical discourse analysis and social work inquiry: unpacking the worlds in our words. *Jurnal Penelitian Sosial Berkualitas*, 21(6), 1203–1220. <https://doi.org/10.1177/1473325021990860>
- Al-Ahmad, & Awwad, A. (2019). Analysis of critical discourse of selected newspaper articles regarding the Chapel Hill shooting incident. *Media Watch*, 11(1), 78–94.
- Albino, L. (2017). A Dilemma between Philosophy and Social Theory in Habermas' View of Rationality: Religion Beyond Communicative Reason. *Analisis Dan Kritik*, 39, 119–143. <https://doi.org/10.1515/auk-2017-0007>
- Danner, L. F. (2015). The public sphere and radical politics: Some notes based on Habermas (Esfera pública e política radical: Apontamentos a partir de Habermas). *Trans/Form/Ação*. <https://doi.org/10.1590/S0101-31732015000300009>
- Duveneage, P. (2018). A rekonstruksi kritis konsep ruang publik dalam Habermas dan media massa. *Jurnal Geesteswetenskappe*, 58(4), 701–715. <https://doi.org/10.17159/2224-7912/2018/v58n4-1a6>
- Gramsci, A. (1971). *Pilihan dari buku catatan penjara*.
- Habermas, J. (1981). *Teori Tindakan Komunikasi 1*. Beacon Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Representation and Signifying Practices of Cultural*. Sage Publications.
- Haryatmoko, Dr. (2016). *Critical discourse analysis (Analisis wacana kritis)*. Kanisius.
- Hoare, & Sperber. (2019). *An Introspection to Antonio Gramsci: His Life, Thought, and Legacy*. Bloomsbury Plc.
- Jakarta, P. (2024, February 13). *Film "Dirty Vote" causes stir days before election*. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/13/film-dirty-vote-causes-stir-days-before-election.html>
- Kim, S. (2015). Hegemony and cultural resistance. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. 2nd ed. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.95055-4>
- Modern Diplomacy. (2024, February 13). *Documentary Film Dirty Vote: Three Legal Experts Talk About Indonesian Election Fraud - Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2024/02/13/documentary-film-dirty-vote-three-legal-experts-talk-about-indonesian-election-fraud/>
- Norman Fairclough. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language - 2nd Edit*. <https://www.routledge.com/Critical-Discourse-Analysis-The-Critical-Study-of-Language/Fairclough/p/book/9781405858229>
- Nurhayati, S., & Fathoni, R. (2024). The documentary film Dirty Vote and its role in shaping political knowledge and voter decisions among Generation Z. *Atlantis Press Proceedings Series*.
- Özçelik, T. G. (2025). An Islamically toned neoliberal hegemony project: The Justice and Development Party (AKP) in Turkey. *Society*. <https://doi.org/10.1007/s12115-025-01078-9>
- Prasetyo, R. (2024). Critical discourse analysis on the ideology of the documentary film Dirty Vote. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Politik*, 8(2), 45–60.

- Putri, D. (2024). Narrative and semiotic analysis of political documentary Dirty Vote. *Jurnal Kajian Budaya*, 12(1), 101–118.
- Rahardjo, Y. (2024). Digital public sphere and political counter-narratives in Indonesia: A case study of Dirty Vote. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(1), 23–41.
- Rasyid, M. (2019). Proses perkembangan cerita perlawanan politik di Indonesia dan Dirty Vote 02. *Paper Untuk Forum Komunikasi Politik Universitas Indonesia*.
- Setiawan, T. (2025). Algorithmic visibility and digital resistance: The circulation of Dirty Vote on YouTube. *Journal of Media and Politics*, 15(1), 67–82.